



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PELAPORAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI RAHAYUNINGTYAS
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 216764

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.215.000.000

1. Tanah Seluas 260 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/114 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 209 m2 di PURWOREJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 105.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/216 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 1859 m2 di MADIUN, WARISAN Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 4640 m2 di MADIUN, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 291.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION 2TP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS STANDAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 151.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	146.516.609
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.803.516.609
III. HUTANG	Rp.	112.949.950
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.690.566.659

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.